

EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SULAWESI UTARA TAHUN 2012 – 2018

John Wesly Koilam, Anderson G. Kumenaung, Debby Ch. Rotinsulu

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Universitas Sam Ratulangi*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data APBD Provinsi Sulawesi Utara periode anggaran 2012-2018. Untuk menghitung tingkat efektivitas dan efisiensi keuangan serta mengetahui keeratan hubungan antara Realisasi Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran Tahun Anggaran 2012-2018 daerah Provinsi Sulawesi Utara. Teknik analisis yang digunakan adalah dengan menghitung Rasio Efektivitas dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah serta analisa korelasi (Correlation LM Test).

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat efisiensi keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama periode 2012-2018 rata-rata adalah sebesar 96,63% atau berada pada tingkat kurang efisien. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum efisien dalam menggunakan anggarannya. Sementara itu, nilai rasio efektivitas keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara periode tahun 2012-2018 mencapai rata-rata sebesar 91,92 per tahun.

Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara adalah sudah efektif, karena dari hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%. Sehingga keeratan hubungan antara variabel belanja dan variabel pendapatan adalah 0,691 atau 69,10 %, sehingga antara variabel belanja dan variabel pendapatan mempunyai hubungan yang searah.

Kata kunci: *efektivitas, efisiensi, keuangan daerah*

ABSTRACT

This study aims to analyze the extent of the regional financial effectiveness and efficiency of North Sulawesi Province. The data used are secondary data, namely the North Sulawesi Provincial Budget data for the 2012-2018 budget period. To calculate the level of effectiveness and financial efficiency and to find out the closeness of the relationship between Realization of Revenue and Realization of Expenditures for the 2012-2018 Budget Year in the North Sulawesi Province. The analysis technique used is to calculate the Effectiveness Ratio and the Regional Financial Efficiency Ratio and correlation analysis (Correlation LM Test).

The results obtained showed that overall, the level of regional financial efficiency of North Sulawesi Province during the period 2012-2018 was an average of 96.63% or was at a less efficient level. This shows that the local government is still not efficient in using its budget. Meanwhile, the value of the regional financial effectiveness ratio of North Sulawesi Province for the period of 2012-2018 reached an average of 91.92 per year.

Thus the level of effectiveness of regional financial management in North Sulawesi Province is already effective, because the results of the calculation show a figure of more than 90%. So that the closeness of the relationship between the shopping variable and the income variable is 0.691 or 69.10%, so that between the expenditure variable and the income variable have a unidirectional relationship.

Keywords: *effectiveness, efficiency, regional finance*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mudah dilakukan. Pada sisi yang lain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi belanja.

Perkembangan APBD terutama di sisi pendapatan daerah dapat menjadi dasar perencanaan jangka pendek (satu tahun) dengan asumsi bahwa perkembangan yang akan terjadi pada satu tahun ke depan relatif sama. Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, untuk itu tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadi PAD sebagai kriteria utama dalam pemberian otonomi kepada daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kekuasaan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah sehingga peran pemerintah adalah sebagai katalisator dan fasilitator karena pihak pemerintahlah yang lebih mengetahui sasaran dan tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai katalisator dan fasilitator tentunya membutuhkan berbagai sarana dan fasilitas pendukung dalam rangka terlaksananya pembangunan secara berkesinambungan.

Bertitik tolak dari hasil pembangunan yang akan dicapai dengan tetap memperhatikan fasilitas keterbatasan sumber daya yang ada maka dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan baik secara nasional atau regional perlu mengarahkan dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara berdaya guna dan berhasil guna dengan disertai pengawasan dan pengendalian yang ketat baik yang dilakukan oleh aparat tingkat atas maupun tingkat daerah serta jajaran sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan Anggaran merupakan acuan umum dari Rencana Kerja Pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya, sementara arah kebijakan keuangan daerah adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi yang luas, nyata dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Dalam rangka pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah wajib melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban terhadap publik yang merupakan stakeholder perlu menjadi perhatian agar dana yang ada digunakan tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berkaitan langsung dengan kebijakan keuangan, pemerintah daerah harus mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Provinsi Utara pada era otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan maka peneliti tertarik mengangkat judul penelitian "Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Pada Periode Tahun 2012-2018."

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Bagaimana tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012-2018?
- b. Bagaimana tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012-2018?
- c. Bagaimana keeratan hubungan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran Tahun Anggaran 2012-2018?

Tujuan Penelitian

Dari uraian Latar Belakang yang telah diuraikan maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012-2018
2. Menganalisis tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012-2018
3. Menganalisis keeratan hubungan antara Realisasi Pendapatan dan Realisasi Pengeluaran Tahun Anggaran 2012-2018

Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam melakukan perencanaan kebijakan pembangunan.
2. Menjadi acuan atau referensi bagi penelitian yang lain dalam lingkup ekonomi regional yang memiliki Korelasi dengan penelitian ini.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

- **Good Governance (Tata Kelola Yang Baik)**

United Nation ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific) mendefinisikan good governance (Tata kelola yang baik) adalah Proses dan institusi menghasilkan hasil yang memenuhi kondisi kebutuhan masyarakat dan memperhatikan penggunaan sumber daya daerah dengan baik. Konsep efisiensi dalam konteks Good Governance (Tata kelola yang baik) juga mencakup penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan dalam pengawasan pemerintah.

- **Laporan Keuangan Sektor Publik**

Laporan keuangan dalam lingkungan sektor publik berperan penting dalam menciptakan akuntabilitas sektor publik. Akuntabilitas adalah konsep penting dimana konsep ini memiliki dampak terhadap semua aspek operasional pemerintah. Hal yang menggarisbawahi adalah akuntansi untuk pelaporan, penjelasan dan justifikasi aktivitas dan pertanggungjawaban terhadap hasil yang dicapai (Eivani dan Emami, 2012).

- **Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah**

Hubungan keuangan antar tingkatan pemerintahan paling sedikit mencakup, antara lain:

1. Pembagian kewenangan Pendapatan (Perpajakan)
2. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan vertikal (kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah)

3. Sistem dan mekanisme untuk mengatasi ketimpangan horizontal (ketimpangan fiskal antar daerah)

- **Kinerja Keuangan Daerah**

Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD.

- **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Keuangan daerah merupakan bagian dari keuangan Negara. Oleh karena itu, dengan merujuk pada pengertian Keuangan Negara dalam UU No. 17 Tahun 2003, maka pengertian Keuangan Daerah dapat didefinisikan yaitu Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

- **Tujuan Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tujuan dari pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab
2. Mampu Memenuhi Kewajiban Keuangan
3. Kejujuran
4. Hasil Guna (Effectiveness) dan Daya Guna (Efficiency)
5. Pengendalian

- **Pendapatan Daerah**

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hal daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (Modul Pelatihan Pendapatan Daerah:20)

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- **Pengeluaran Rutin Pemerintah**

Pengeluaran rutin pemerintah adalah anggaran yang disediakan untuk menyelenggarakan tugas umum dan pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran rutin ini dipergunakan untuk:

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang
3. Subsidi daerah otonomi
4. Bunga dan cicilan hutang
5. Pengeluaran rutin lainnya

- **Konsep Efisiensi**

Efisiensi adalah pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

- **Konsep Efektivitas**

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan.

- **Pengertian Korelasi**

Menurut Algifari (1997; 146), bahwa untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dengan menggunakan koefisien korelasi adalah dengan menggunakan nilai absolut dari koefisien korelasi tersebut. Selanjutnya menurut Sardjonopermono (1981; 1), analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan garis lurus (linear) antara dua variabel atau lebih.

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dimana penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang suatu situasi, keadaan atau bidang kajian yang menjadi obyek penelitian. Hasil deskriptif dapat bersifat kuantitatif (Menggunakan angka-angka maupun kualitatif (kalimat verbal) atau keduanya. Amri (2013).

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan untuk menganalisa hasil penelitian ini adalah dengan analisis deskriptif, dengan rasio perbandingan, efisiensi, efektivitas dan analisis korelasi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara. Adapun formulasi perhitungan sebagai berikut

- **Efisiensi**

Efisiensi dapat diukur dengan rasio-rasio antara output/keluaran dan input/masukan sekunder, sedangkan analisis yang digunakan terhadap pengelolaan keuangan daerah dengan pengeluaran rutin menggunakan ukuran tingkat efisiensi yaitu perbandingan antara realisasi pengeluaran anggaran rutin dengan pendapatan/penerimaan daerah dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase.

$$Efisiensi = \frac{Pengeluaran}{Rutin Penerimaan} \times 100\%$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi pengeluaran belanja administrasi umum dan realisasi penerimaan dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut dapat dilakukan terhadap system penelolaan keuangan daerah, dengan kriteria penilaian berdasarkan data kinerja keuangan yang disusun dalam Tabel berikut ini (Medi, 1996: 77).

Tabel 1. Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
100 % ke atas	Tidak efisien
90 % - 100 %	Kurang efisien
80 % - 90 %	Cukup efisien
60 % - 80 %	Efisien
Dibawah dari 60 %	Sangat efisien

Sumber : Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, 1997

- **Efektivitas**

Analisis efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah dirumuskan dengan menggunakan rasio perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target yang ditetapkan dikalikan dengan seratus dalam bentuk persentase. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Nilai efektivitas diperoleh dari perbandingan sebagai mana tersebut diatas diukur dengan criteria penilaian kinerja keuangan yang disusun dalam table berikut ini (Medi, 1996: 77).

Tabel 2. Kriteria Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan	Kriteria
Di atas 100 %	Sangat efektif
90 % - 100 %	Efektif
80 % - 90 %	Cukup efektif
60 % - 80 %	Kurang efektif
Kurang dar 60 %	Tidak efektif

Sumber : Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, 1997

• Analisis Korelasi

Untuk mengetahui keeratan hubungan antara realisasi penerimaan (Y) dan realisasi pengeluaran belanja (X) dipergunakan analisis korelasi dengan formulasi sebagai berikut (Algifari, 1997: 146).

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X) (\sum Y)}{\sqrt{(n \sum (X)^2 - (\sum X)^2) (n \sum (Y)^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Di mana :

- r = adalah koefisien korelasi
- n = adalah jumlah periode
- y = adalah realisasi penerimaan
- x = adalah realisasi pengeluaran belanja administrasi umum

besarnya koefisien korelasi (r) antara dua variabel (Y dan X) adalah nol sampai dengan + 1. apabila dua buah variabel (Y dan X) mempunyai nilai r = 0 berarti variable-variabel tersebut tidak ada hubungan. Apabila variabel-variabel itu mempunyai r = + 1, maka kedua variabel tersebut mempunyai hubungan yang sempurna.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

• Analisis Efisiensi

Efisiensi merupakan suatu pengukuran perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran rutin dan realisasi penerimaan atau pendapatan daerah. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin baik, begitu pula sebaliknya, dalam hal ini dengan mengasumsikan bahwa pengeluaran yang dibelanjakan sesuai peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan. Pada sektor pelayanan masyarakat adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan dengan baik dengan pengorbanan seminimal mungkin. Suatu kegiatan dikatakan efisien jika pelaksanaan pekerjaan tersebut telah mencapai hasil dengan biaya yang terendah atau dengan biaya minimal diperoleh hasil yang diinginkan.

Menurut Mahmudi (2007) efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input. Output merupakan realisasi belanja untuk memperoleh penerimaan daerah dan input merupakan realisasi dari penerimaan daerah dalam hal ini adalah pendapatan. Untuk menganalisis efisiensi dalam pengelolaan keuangan adalah dengan membandingkan antara realisasi belanja dengan realisasi pendapatan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Realisasi Pendapatan}} \times 100\%$$

Efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada table 3. Sebagai Berikut.

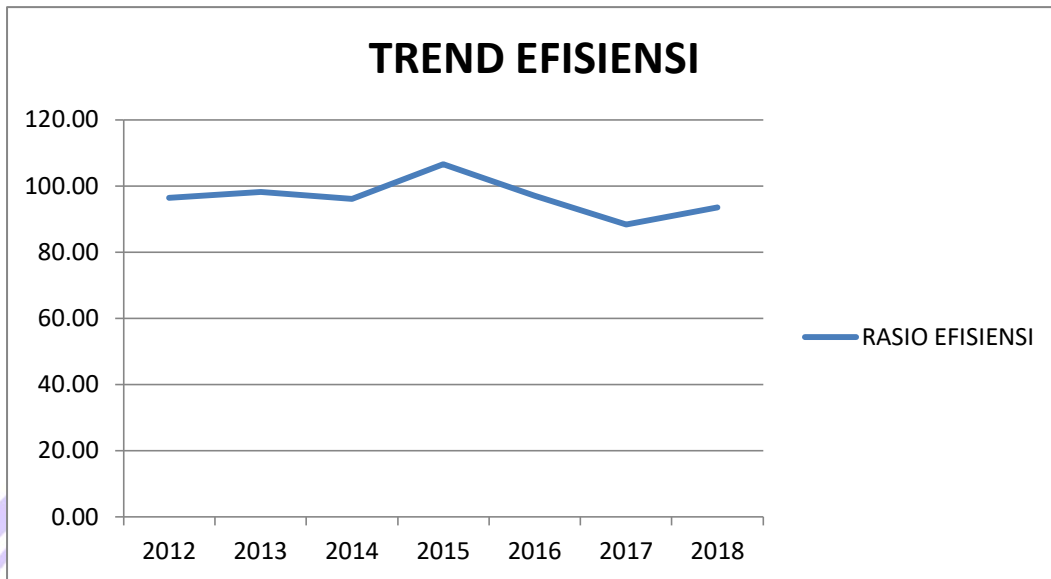
Tabel 3. Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2018

No.	Tahun	Realisasi Pendapatan	Realisasi Belanja	Rasio Efisiensi (%)	Keterangan
1.	2012	1.834.908.287.642	1.771.118.335.760	96,52	Kurang efisien
2.	2013	2.062.083.087.023	2.025.590.874.885	98,23	Kurang efisien
3.	2014	2.320.810.782.597	2.229.484.466.963	96,06	Kurang efisien
4.	2015	2.527.705.785.301	2.693.083.788.018	106,54	Tidak efisien
5.	2016	2.885.186.120.406	2.801.145.393.510	97,09	Kurang efisien
6.	2017	3.556.372.800.000	3.145.968.900.583	88,46	Cukup efisien
7.	2018	3.779.295.766.441	3.533.240.490.254	93,49	Kurang efisien
	Rata-rata	2.709.480.375.630	2.599.947.464.282	96,63	

Sumber : Data diolah, 2019

Pada Tabel 3. menjelaskan hasil perhitungan Rasio Efisiensi dalam tujuh tahun anggaran yang tertera dikolom lima, sedangkan dikolom kedua mencantumkan tahun anggaran yaitu tahun 2012 sampai 2018, kolom keempat adalah Realisasi Belanja dibagi dengan Realisasi Pendapatan pada kolom ketiga. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Provinsi Sulawesi Utara selama tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2018 pada persentase 96,63% dan dikatakan kurang efisien. Hal ini disebabkan minimnya penerimaan daerah jika dibandingkan dengan pengeluaran.

Adapun Grafik trend tingkat efisiensi keuangan daerah tahun anggaran 2012-2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat di bawah ini :



Grafik 1. Trend Tingkat Efisiensi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2012-2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Grafik 1 menunjukkan tingkat efisiensi dari tahun 2012 sampai dengan 2018 yang dihasilkan dari perhitungan rasio efisiensi. Bilangan pada garis vertikal menunjukkan persentase dan garis horizontal menjabarkan ketujuh tahun anggaran yang diteliti yaitu tahun 2012 sampai tahun 2018. Dari grafik digambarkan progres tingkat efisiensi dari tahun anggaran 2012 sampai 2018.

- **Analisis Efektifitas**

Anggaran belanja merupakan batas maksimum pengeluaran yang boleh dilakukan pemerintah daerah, pemerintah daerah akan dinilai baik kinerjanya apalagi realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran dapat diketahui secara langsung besarnya anggaran belanja dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya. Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis yaitu: a) selisih disukai (favourable variance) yaitu realisasi yang lebih kecil dari anggarannya dan b) selisih tidak disukai (unfavorable variance) yaitu realisasi belanja yang lebih besar dari anggarannya (Mahmudi : 2010 :157)

Untuk menganalisis efektifitas pengelolaan keuangan dapat dilihat dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target belanja sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Belanja}} \times 100\%$$

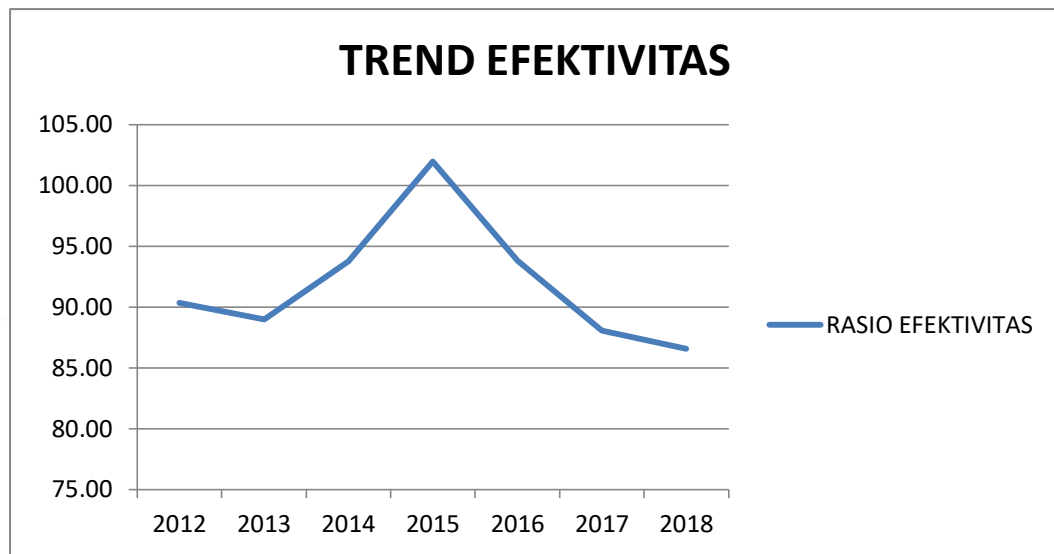
Efektivitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada Tabel. 4. berikut :

Tabel 4. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2018

No	Tahun	Target Belanja	Realisasi Belanja	Rasio Efektivitas (%)	Keterangan
1.	2012	1.960.448.831.535	1.771.118.335.760	90,34	Efektif
2.	2013	2.276.652.783.917	2.025.590.874.885	88,97	Cukup efektif
3.	2014	2.378.335.727.000	2.229.484.466.963	93,74	Efektif
4.	2015	2,641.789.104.310	2.693.083.788.018	101,94	Sangat efektif
5.	2016	2.986.450.969.444	2.801.145.393.510	93,80	Efektif
6.	2017	3.572.342.500.000	3.145.968.900.583	88,06	Cukup efektif
7.	2018	4.081.463.863.900	3.533.240.490.254	86,57	Cukup efektif
	Rata-rata	2.842.497.682.872	2.599.947.464.282	91,92	Efektif

Sumber : Data diolah, 2019

Tabel 4. merangkum hasil perhitungan untuk mengetahui Rasio Efektivitas. Pada kolom kedua mencantumkan tahun anggaran yaitu tahun 2012 sampai 2018 dan pada kolom ketiga dan keempat adalah Target dan Realisasi yang merupakan Target Belanja dan Realisasi Belanja. Secara keseluruhan, rata-rata tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Provinsi Sulawesi Utara selama tahun anggaran 2012 sampai dengan tahun 2018 pada persentase 91,92 % dan dinyatakan efektif. Hal ini menunjukkan pengelolaan keuangan Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif, hal ini ditunjukkan dari hasil perhitungan yang menunjukkan angka lebih dari 90%. Untuk mengetahui trend tingkat efektifitas keuangan daerah tahun anggaran 2012-2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dapat dilihat pada grafik di bawah ini :



Sumber : Data diolah,2019

Grafik 2 Trend tingkat efektifitas keuangan daerah tahun anggaran 2012-2018 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara

Grafik diatas terlihat bahwa tingkat efektifitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara selama Tahun 2012-2018 cenderung stabil yang ditunjukkan dengan tingkat efektifitas rata-rata per tahun sebesar 91,92 % yang berarti pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif.

Dari hasil analisis dengan menggunakan kedua rumus tersebut di atas dapat diketahui masing-masing tingkat efisiensi dan efektifitas (Tabel 2 dan 3), dan disederhanakan seperti pada Tabel 5, berikut ini.

Tabel 5. Kinerja Pengelolaan Keuangan APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012 – 2018

NO.	TAHUN ANGGARAN	KRITERIA	
		EFISIENSI %	EFEKTIVITAS %
1.	2012	96,52	90,34
2.	2013	98,23	88,97
3.	2014	96,06	93,74
4.	2015	106,54	101,94
5.	2016	97,09	93,80
6.	2017	88,46	88,06
7.	2018	93,49	86,57

Sumber : Data Diolah, 2019

Dengan demikian dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas dari pengelolaan keuangan daerah oleh pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara di mana tingkat efisiensi berkisar antara 88,46% sampai dengan 106,54% ini berarti kurang efisien. Demikian untuk tingkat efektifitas berkisar antara 86,57% sampai dengan 101,94% ini berarti efektif.

- **Analisis Korelasi Dilihat dari Keeratan Hubungan**

Koefisien korelasi merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana keeratan hubungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Jika koefisien korelasi berhubungan dengan sampel yang digunakan, maka koefisien korelasi diberi simbol r yang besarnya adalah akar koefisien determinasi (r^2). Berdasarkan uraian ini formula yang digunakan untuk melakukan analisis terhadap keeratan hubungan antara realisasi pendapatan daerah dengan realisasi belanja seperti pada bab terdahulu yakni :

$$r = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(n \sum (X)^2 - (\sum X)^2) (n \sum (Y)^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Di mana :

- r = adalah koefisien korelasi
- n = adalah jumlah periode
- y = adalah realisasi penerimaan
- x = adalah realisasi pengeluaran belanja administrasi umum

Namun demikian, untuk menghindari kesalahan manual dalam melakukan estimasi untuk mengetahui keeratan hubungan antara kedua variabel itu sesuai data pada Tabel 4.1, yang diolah dengan komputer (EViews 8) dengan hasilnya seperti print out computer Tabel 4.4 di bawah ini :

Tabel 6 Keeratan Hubungan Antara Variabel Realisasi Penerimaan dengan Realisasi Belanja Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2012-2018

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.376368	Prob. F(2,3)	0.3766
Obs*R-squared	3.349563	Prob. Chi-Square(2)	0.1873

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 01/19/19 Time: 23:28

Sample: 2012 2018

Included observations: 7

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
REALISASI_BELANJA	-0.098036	0.119091	-0.823201	0.4707
C	2.23E+11	3.06E+11	0.727019	0.5198
RESID(-1)	-0.026965	0.420406	-0.064140	0.9529
RESID(-2)	-1.026093	0.619432	-1.656507	0.1962
R-squared	0.478509	Mean dependent var		0.000141
Adjusted R-squared	-0.042982	S.D. dependent var		1.54E+11
S.E. of regression	1.57E+11	Akaike info criterion		54.69546
Sum squared resid	7.42E+22	Schwarz criterion		54.66455
Log likelihood	-187.4341	Hannan-Quinn criter.		54.31343
F-statistic	0.917579	Durbin-Watson stat		2.796582
Prob(F-statistic)	0.527355			

Pada perhitungan Correlation LM Test tersebut diketahui nilai R-squared (R^2)= 0.478 sedangkan nilai korelasi (r) diperoleh dari akar (R^2). Hasil akar kuadrat dari (R^2)= 0.478 adalah 0,691. Sehingga keeratan hubungan antara variabel belanja dan variabel pendapatan adalah 0,691 atau 69,10 %, sehingga antara variabel belanja dan variabel pendapatan mempunyai hubungan yang searah. Artinya perubahan nilai variabel belanja dan perubahan nilai variabel pendapatan searah. Jadi jika nilai variabel belanja naik, maka nilai variabel pendapatan juga naik. Sebaliknya jika nilai variabel belanja turun, maka nilai variabel pendapatan juga akan turun. Dalam hasil analisis ini nilai koefisien korelasinya (r) positif karena 0,628 atau 62,80 %, mendekati 1 (satu) sehingga hubungan antara realisasi pendapatan daerah (variabel Y) dan realisasi belanja (variabel X) dapat dikatakan positif atau nyata.

Pembahasan

Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 sampai 2018 berjalan dengan baik atau efektif, Hal ini terjadi karena tingginya rasio efektivitas yang ditentukan dari perbandingan antara realisasi belanja dengan target Belanja dengan tingkat efektivitas rata-rata per tahun sebesar 91,92 % yang berarti pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara sudah efektif. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan Santoso, E. (2011) yang mengemukakan bahwa tingkat efektivitas pada daerah yang ditelitinya sudah efektif.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012 sampai 2018 dengan rata-rata persentase 96,63% dan dikatakan kurang efisien. Hal ini disebabkan karena tingginya pembelanjaan daerah jika dibandingkan dengan penerimaannya, berarti kemampuan daerah dalam membiayai setiap program dan kegiatan masih perlu ditingkatkan lagi. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Harun (2007) yang menyatakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah pada instansi yang ditelitinya dinyatakan efisien.

Pada perhitungan Correlation LM Test untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel belanja dan variabel pendapatan maka diketahui nilai R-squared (R^2)= 0.478 sedangkan nilai korelasi (r) diperoleh dari akar (R^2). Hasil akar kuadrat dari (R^2)= 0.478 adalah 0,691. Sehingga keeratan hubungan antara variabel belanja dan variabel pendapatan adalah 0,691 atau 69,10 %, sehingga antara variabel belanja dan variabel pendapatan mempunyai hubungan yang searah. Artinya perubahan nilai variabel belanja dan perubahan nilai variabel pendapatan searah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang diperoleh dalam penelitian dengan judul “Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun 2012-2018 maka kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012-2018 cenderung semakin menurun, dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efisiensi pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012-2018 rata-rata adalah sebesar 96,63% artinya tingkat efisiensi masih kurang karena hasilnya kurang dari 100%. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum efisien dalam menggunakan anggarannya.
2. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2012-2018 cenderung stabil, dari hasil analisis menunjukkan bahwa perhitungan dengan menggunakan formulasi tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Utara tahun 2012-2018 rata-rata adalah sebesar 91,92 per tahun. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara adalah sudah efektif, karena dari hasil perhitungan menunjukkan angka lebih dari 90%.
3. Dari hasil perhitungan Correlation LM Test tersebut diketahui nilai R-squared (R^2)= 0.478 sedangkan nilai korelasi (r) diperoleh dari akar (R^2). Hasil akar kuadrat dari (R^2)= 0.478 adalah 0,691. Sehingga keeratan hubungan antara variabel belanja dan variabel pendapatan adalah 0,691 atau 69,10 %, sehingga antara variabel belanja dan variabel pendapatan mempunyai hubungan yang searah.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan dan pembahasan di atas, maka saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Utara :

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian pemerintah daerah harus memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif supaya belanja bisa lebih efisien.
2. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara perlu memperhatikan setiap anggaran belanja secara khusus dalam pembelanjaan aparatur pemerintah diharapkan bisa efektif dan efisien, dan melakukan skala prioritas dalam penentuan anggaran pembelanjaan.

3. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dihimbau agar lebih memprioritaskan belanja modal untuk kepentingan masyarakat berupa pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan masyarakat karena Pendapatan Asli Daerah banyak bersumber dari masyarakat dalam bentuk pajak daerah dan retribusi daerah, sehingga masyarakat akan termotivasi untuk ikut serta dalam pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, 1997**, “Statistika Induktif untuk Ekonomi dan Bisnis” UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Amri, Baso, 2013**. Jenis dan Pendekatan Penelitian. Materi Program Mobilisasi Dosen Pakar/Ahli. Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional.
- Bastian, I. 2010**. Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Badan Pusat Statistik. 2018. Sulut Dalam Angka. BPS Provinsi Sulut. Manado
- Depdagri, 1997**, Kepmendagri No. 690.900.327, 1996, “Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan”.
- Eivani, F. Nazari, K and Emami, M. 2012**. African Journal of Business Management. Vol.6(29). 8475-8482. Diakses 15 Oktober 2018
- Halim, Abdul dan Supomo, 2001**. Akuntansi Manajemen. Edisi Kesepuluh. Yogyakarta: BPFE.
- Handayani, W. 2011**. Akuntansi Sektor Publik. Malang: Bayumedia
- Harun, Amran 2007**. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Mahasiswa. <http://jimfeb.ub.ac.id>. Diakses 25 Oktober 2018. Hal. 1.
- Jaya, Wihana Kirana, 1999**, Analisis Potensi Keuangan Daerah Pendekatan Makro, PPPEB UGM Yogyakarta.
- Kindangen, Araxta O. 2012**. Analisis Efisiensi dan Efektivitas Penegelolaan Keuangan Daerah Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Utara. Skripsi (Tidak dipublikasi) Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNSRAT.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2014. Materi Pelatihan Belanja Daerah. Jakarta
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga
- Medi, Setianus, 1996, Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Yogyakarta
- Mewengkang, Frangky 2010. Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Skripsi
- Munandar, 1999**, “ Budgeting”, Edisi I, BPFE, Yogyakarta
- Nordiawan Dedy, Hertiaty Ayuningtyas, 2010**. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Ryan, C. And Ng, C. 2000**. Public sector corporate governance disclosures: an examination of annual reprotng practices in Queensland. Australian Journal of Public Administration. Hal 11-23.
- Sarjonopermono I., 1981, “Sekelumit Analisa Regresi dan Korelasi”, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta